

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENYELESAIAN SENGKETA PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN
DENGAN INVESTASI (PAYDI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Gilang Firmansyah
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing: 1. Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.
2. Dr. Elly Hernawati, S.H., M.Hum.

Abstract

The growth of the insurance industry in Indonesia along with the development of people's lifestyles and growing needs, the insurance industry continues to innovate to meet the needs of modern society today, one of which is the Investment Linked Insurance Product (PAYDI) life insurance product that combines life protection guarantees and investment benefits. In writing this thesis discusses the legal protection of consumers for disputes that occur in PAYDI products, the existence of obligations and actions prohibited by law violated by business actors as one of the factors for the occurrence of disputes, resulting in the non-fulfillment of consumer rights. This thesis writing is normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach to its discussion. This research shows that the actions violated by business actors and result in consumer losses, business actors must be responsible.

Abstrak

Bertumbuhnya industri asuransi asuransi di Indonesia seiring dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat dan kebutuhan yang terus bertambah, industri asuransi terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern saat ini, salah satunya Produk Asuransi Yang Dikaitkan Investasi (PAYDI) produk asuransi jiwa yang menggabungkan jaminan perlindungan jiwa serta keuntungan investasi. Pada penulisan skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen atas sengketa yang terjadi pada produk PAYDI, adanya kewajiban dan perbuatan yang dilarang undang-undang dilanggar oleh pelaku usaha sebagai salah satu faktor terjadinya sengketa, berakibat tidak terpenuhinya hak-hak konsumen. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual pada pembahasannya. Penelitian ini menunjukkan adanya perbuatan yang dilanggar pelaku usaha dan mengakibatkan kerugian konsumen maka pelaku usaha wajib bertanggungjawab.